

BAB IV

FAKTOR KEBANGKITAN EMPAT PARTAI KONSERVATIF DI EROPA

Dalam bab empat ini merupakan pembahasan utama dalam menjawab proses kebangkitan empat partai konservatif yang terjadi di Uni Eropa, karena sejak tahun 2010-2016 banyak sekali fenomena-fenomena serta isu-isu yang terjadi didalam Uni Eropa. Beberapa isu yang dimaksud seperti isu internal Uni Eropa yang muncul atas sikap skeptis masyarakat eropa (*euroseptic*) kepada Uni Eropa yang disebabkan adanya peningkatan angka pengangguran di negara-negara eropa, juga munculnya kebijakan pengetatan anggaran (*austerity*) di Uni Eropa, yang berdampak kepada sikap anti-euro di Uni Eropa.

Namun dalam problematika yang terjadi di Eropa bukan hanya dari internal Uni Eropa itu sendiri, melainkan adanya isu eksternal yang juga kian memperparah permasalahan yang melanda negara-negara di Uni Eropa seperti adanya gejolak peningkatan imigran yang datang dari negara-negara berkonflik untuk mencoba masuk kedalam negara di Uni Eropa. Dari peningkatan imigran inilah yang menyebabkan banyak menimbulkan ketakutan masyarakat eropa akan akulturasi migran di eropa kemudian banyaknya sikap diskriminatif masyarakat eropa kepada kelompok minoritas yang datang memaksa kelompok minoritas tersebut melaksanakan tindakan-tindakan yang radikal guna membalas perlakuan diskriminatif tersebut.

A. Faktor Internal Di Eropa Tahun 2010-2016

Faktor internal yang menjadi pendukung kebangkitan empat partai konservatif sejak tahun 2010-2016 ialah tingginya angka pengangguran yang ada di negara di Eropa, lalu ditambah dengan adanya kebijakan pengetatan anggaran (*austerity*) kepada seluruh negara anggota di Uni Eropa dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian eropa. Hal yang sangat berkaitan dengan teori konservatif dimana terdapat tiga ciri yang menjadikan kelompok elit politik dapat dikatakan sebagai empat partai konservatif, karena menurut teori konservatif dalam buku Ramlan Surbakti yang berjudul *Memahami Ilmu Politik* (Surbakti, 2010) mengatakan bahwa tiga ciri utama paham konservatif ialah masyarakat harus memiliki struktur (tata) yang stabil dimana struktur tersebut diperlukan untuk suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan penuh yang mengikat, tetapi bertanggung jawab kepada setiap individu-individu masyarakatnya serta menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah.

1. Meningkatnya Pengangguran

Banyaknya permasalahan yang tengah terjadi didalam internal Uni Eropa menjadi proses awal bagi para kelompok sayap kanan dalam mempersiapkan kebangkitan partai-empat partai konservatif di Eropa tahun 2016 tersebut. Hal inilah yang dimanfaatkan para tokoh politik konservatif dalam menjadikan momentum tersebut sebagai antisipasi perpolitikan yang telah lama terpuruk. Seperti yang dilakukan Marine Le Pen pada pemilihan umum yang dilaksanakan di Perancis, Marine Le Pen mencoba mengangkat isu-isu tentang permasalahan tenaga kerja di Uni Eropa yang semakin lama semakin membuat perekonomian Perancis menurun.

Ada sekitar 144 program yang ditawarkan oleh Le Pen (Marine, 2017), yang mana dari sekian banyak program tersebut Le Pen mencoba membahas mengenai penghapusan pembatasan tenaga kerja di Perancis yang bertujuan untuk dapat mengangkat kembali tenaga kerja lokal di Perancis agar kedepannya dapat bersaing secara sehat dengan tenaga kerja asing yang berada didalam negeri ataupun diluar negeri.

Dalam program tersebut juga Marine Le Pen menjanjikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Perancis agar dapat memberikan suara-suaranya dikarenakan jika Marine Le Pen menjadi Presiden Perancis, ia berjanji akan mengkaji dan mengatur ulang peraturan-peraturan yang membahas mengenai tenaga kerja asing. Karena bagi Le Pen peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh dewan Uni Eropa dinilai sangat tidak menguntungkan bagi Perancis sebagai negara yang berdaulat.

Marine Le Pen juga mengajak seluruh golongan masyarakat Perancis untuk dapat memberikan dukungannya sehingga semua program-program yang ia rasa menguntungkan bagi masyarakat Perancis dapat segera dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Tidak terkecuali para petinggi-petinggi empat partai konservatif lainnya yang juga diajak untuk dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal Uni Eropa.

Karena bagi Le Pen permasalahan yang terjadi di negaranya tersebut tentunya juga berdampak pada negara-negara anggota lainnya. Hal itulah yang membuat Le Pen mencoba menyatukan para tokoh-tokoh elit empat partai konservatif di Uni Eropa untuk dapat menyatukan pikiran serta tujuan dalam menyelesaikan permasalahan internal tersebut.

"Pemimpin Eropa harus berkumpul untuk bernegosiasi, membicarakan kegagalan euro dan penghematan, dan mulai melakukan pembubaran sistem mata uang tunggal yang diperlukan untuk mengembalikan pertumbuhan, pekerjaan dan pengurangan utang, seru Le Pen" (Armandhanu, Reuters, 2015)

Selanjutnya isu pengangguran juga sangat berdampak pada perekonomian negara anggota Uni Eropa lainnya yaitu Italia. Dimana negara Italia dan Perancis sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dan ketiga di Eropa juga mengalami peningkatan dalam angka pengangguran hingga 10,2 persen (Rachman, 2012). Hal inilah yang membuat banyak masyarakat di Italia khususnya di Italia Utara yang mencoba untuk memisahkan diri dari negara Italia, karena bagi masyarakat Italia segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Italia dinilai hanya menguntungkan Italia di bagian bawah (selatan).

Sehingga dengan adanya rasa ketidakadilan yang muncul dikalangan masyarakat Italia Utara menjadi momentum awal bagi empat partai konservatif di Italia yaitu Partai Lega Nord (Liga Utara) untuk dapat menarik seluruh suara masyarakat Italia dengan menyuarakan sikap skeptisnya terhadap bergabungnya Italia didalam Uni Eropa. Salah satu tokoh elit empat partai konservatif di Italia ialah Matteo Salvini yang menentang keras adanya penyatuan negara-negara di benua eropa dalam kesatuan Uni Eropa.

Karena bagi Salvini dengan adanya penyatuan negara tersebut akan menciptakan persaingan yang tidak sehat antara negara-negara anggota didalamnya, sebab adanya perbedaan perekonomian dari setiap negara akan sangat berdampak pada negara-negara yang masih belum mampu bersaing secara bebas tanpa ada batasan-batasan.

"Tidak seperti Uni Soviet lalu, di mana pengangguran dan imigrasi sangat menjadi masalah yang besar. Ya untuk Eropa Baru, yang didirikan oleh para tokoh sebagai penghargaan atas kerja rakyat," kata Matteo Salvini, pemimpin Partai Northern League di Italia (Armandhanu, Reuters, 2015).

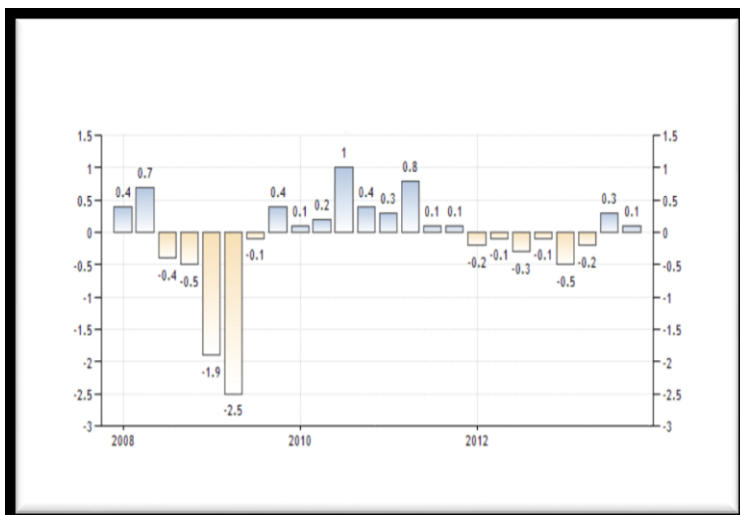
Dan dengan adanya pernyataan tersebut menjadikan Matteo Salvini sebagai perwakilan aspirasi masyarakat Italia terkhusus di bagian utara dalam menanggapi permasalahan pengangguran yang sedang melanda negara-negara anggota di Uni Eropa. Padahal jika melihat dari pertumbuhan perekonomian negara Italia, sangat jelas bahwa Italia sangat mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakatnya, hal itu bukan semata-mata asumsi dasar yang menjadi penguat persepsi mengenai meningkatnya pengangguran di Italia. Karena Italia merupakan salah satu dari tiga negara besar yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat.

Peningkatan angka pengangguran di Eropa merupakan sebuah permasalahan yang dialami Negara-negara di Eropa yang mulai muncul pada tahun 2000an hingga saat ini. Hal itu terbukti dengan banyaknya Negara-Negara di Eropa yang mengalami krisis ekonomi dikarenakan peningkatan pengangguran di negaranya (IRIB, 2013). Salah satu studi kasus yang paling banyak menjadi pembahasan di Uni Eropa ialah krisis yang terjadi di Yunani. Yunani yang akhirnya mulai menolak segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa dinilai hanya memperparah permasalahan krisis ekonomi yang melandanya, seperti yang dikatakan Le Pen kepada warga Perancis.

Krisis di Yunani diyakini terjadi karena tingginya inflasi yang dialami oleh negara tersebut. Selama 30 tahun defisit anggaran Yunani rata-rata mencapai 6% dari PDB (Produk Domestik Bruto) yang mereka hasilkan. Bahkan

pada tahun 2010 tingkat defisit anggaran pemerintahan Yunani mencapai angka 10,6% dari PDB. Hal ini menyebabkan pemerintah Yunani tidak bisa membayar utang luar negeri yang mencapai angka \$532,9 miliar (Triesanto Romulo Simanjuntak & Drs Dafri Agussalim, 2013). Berdasarkan data yang dilansir kantor statistik Uni Eropa, Eurostat, sekitar 17,4 juta orang tidak memiliki pekerjaan di 17 negara anggota di seluruh Eropa.

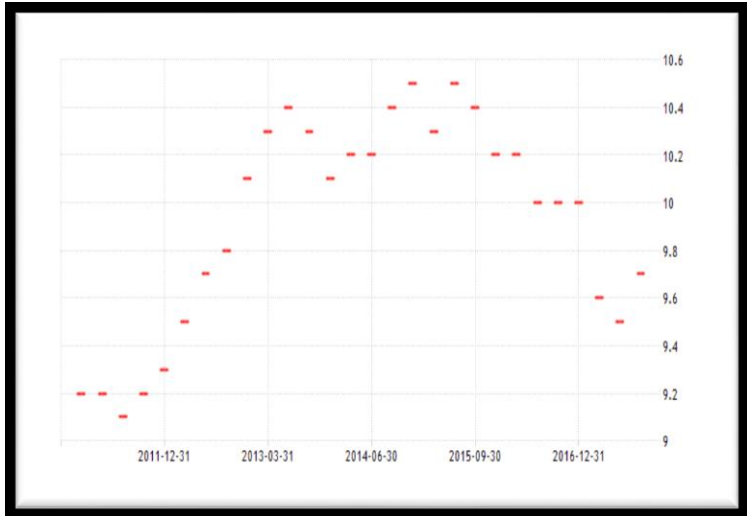
Gambar 4.A.1. Grafik Pertumbuhan PDB Zona Euro Kuartal, 2008-2013



Sumber :

Trading Economics. Data Eurostat per September 2013

Gambar 4.A.2. Persentase Angka Pengangguran di Negara Perancis (%)

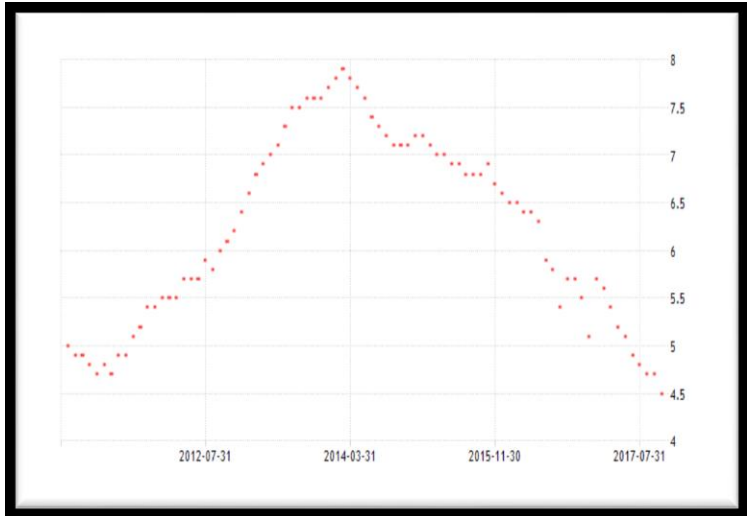


Sumber :

<https://id.tradingeconomics.com/france/unemployment-rate>

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 telah dilakukan pendataan sebanyak 28 kali dan tercatat angka pengangguran diseluruh wilayah Perancis diantara angka 9% hingga 10,6%. Puncak angka pengangguran di Perancis tahun 2014 hingga 2015 yang sampai menyentuh angka 10,5% lalu sempat menurun menjadi 10,1% pada pertengahan tahun 2014 tetapi ditahun 2015 tercatat angka pengangguran meningkat kembali di angka 10,4%. Memasuki tahun 2015 hingga 2016 angka pengangguran perlahan menurun hingga 9,5% dan ditutup dengan angka 9,7% di pertengahan tahun 2017.

Gambar 4.A.3. Persentase Angka Pengangguran di Negara Belanda (%)

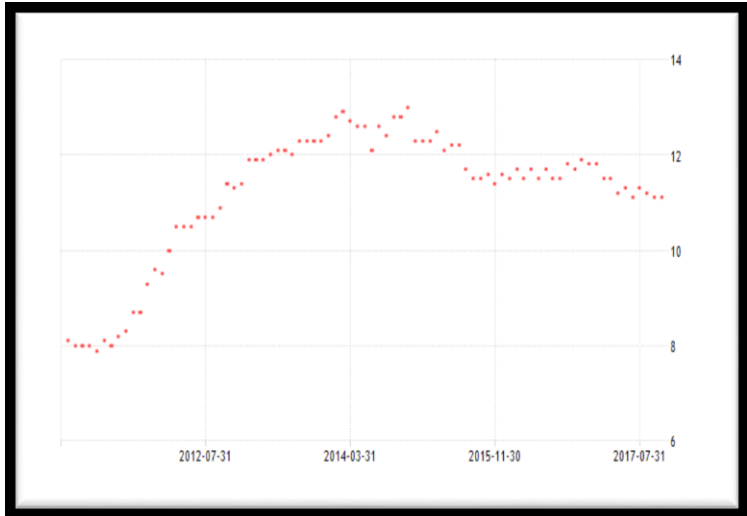


Sumber :

<https://id.tradingeconomics.com/netherlands/unemployment-rate>

Untuk data Pengangguran di Belanda dari tahun 2010 sampai tahun 2017 telah dilakukan pendataan sebanyak 83 kali. Terlihat di tabel diatas bahwa puncak angka pengangguran di Belanda ada di tahun 2014 yang berada di angka 7,9% padahal jika melihat data diatas Belanda pada tahun 2010 hanya berada di angka 4,5% hingga 5% namun meningkat perlahan-lahan sampai tahun 2014 kemudian menurun kembali di tahun 2017. Angka pengangguran di Belanda dibandingkan dari Perancis dan Italia lebih rendah dan memberikan grafik penurunan yang sangat cepat.

Gambar 4.A.4. Persentase Angka Pengangguran di Negara Italia (%)

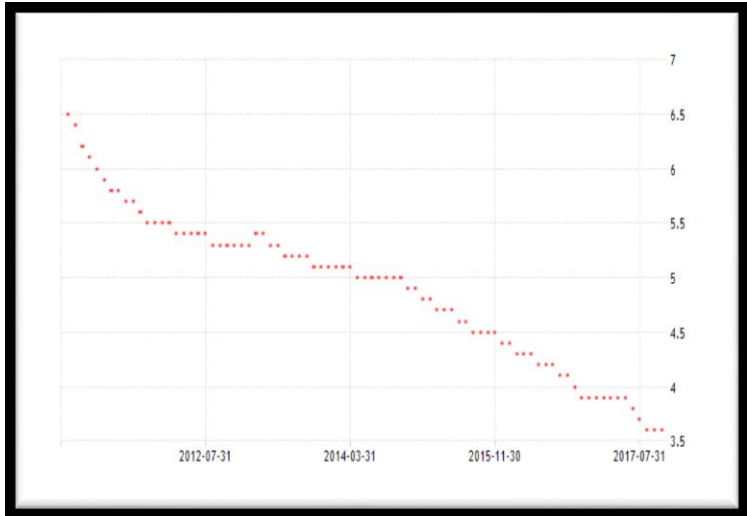


Sumber :

<https://id.tradingeconomics.com/italy/unemployment-rate>

Negara Italia berada di posisi teratas diantara tiga negara besar lainnya Perancis, Belanda dan Jerman. Walaupun hanya berbeda tipis dengan angka pengangguran yang ada di Perancis. Tercatat angka penganggura di Italia bermain diangka 8% sampai dengan 13% dan hanya turun sedikit ditahun 2017 menjadi 11%. Maka dapat dipastikan bahwa Italia masih sangat sulit dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di negaranya.

Gambar 4.A.5. Persentase Angka Pengangguran di Negara Jerman (%)

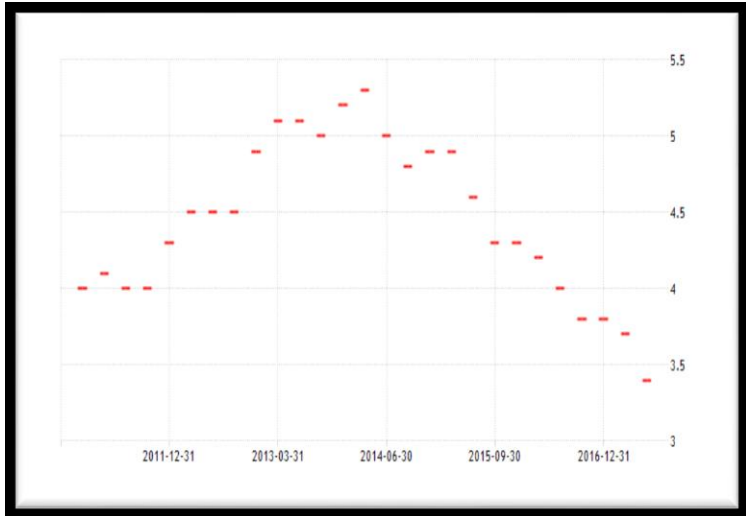


Sumber :

<https://id.tradingeconomics.com/germany/unemployment-rate>

Jerman merupakan negara dengan angka terendah dalam hal peningkatan pengangguran karena dari statistik diatas Jerman yang di tahun 2010 memiliki angka pengangguran tertinggi di angka 6,4% perlahan-lahan mulai turun menjadi 3,6% ditahun 2017. Namun tetap saja permasalahan pengangguran masih menjadi permasalahan yang harus cepat diselesaikan pemerintah Jerman guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih penurunan dari 6,4% menjadi 3,6% bukan tidak mungkin akan meningkat kembali melihat kebijakan-kebijakan di Uni Eropa yang mulai memberikan dampak yang sangat besar kepada setiap negara anggotanya.

Gambar 4.A.6. Persentase Angka Pengangguran di Uni Eropa (%)



Sumber :

<https://id.tradingeconomics.com/european-union/long-term-unemployment-rate>

Secara keseluruhan Uni Eropa juga telah terdata sebanyak 27 kali dari tahun 2010 sampai tahun 2017 dan dari data tersebut 28 negara anggota di Uni Eropa termasuk Inggris sebelum melakukan referendum dari Uni Eropa berada di angka 3,4% sampai dengan 5,3%. Dimana puncak dari pengangguran di Uni Eropa pada tahun 2013 hingga 2014 yang mungkin hampir seluruh negara anggota Uni Eropa mengalami peningkatan yang sangat signifikan ditahun tersebut. Inilah alasan mengapa Uni Eropa dengan mudahnya terpecah perlahan-lahan dimulai dari Inggris yang secara tegas mengajukan referendum kepada Uni Eropa (Trading Economics, 2017).

2. Kebijakan Pengetatan Anggaran

Kebijakan *austerity* adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan konstitusi Eropa dalam menekan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Uni Eropa melalui pengetatan anggaran di setiap Negara-Negara di Uni Eropa. Pengetatan anggaran atau austeritas adalah serangkaian kebijakan ekonomi yang diterapkan dengan tujuan mengurangi defisit anggaran pemerintah. Pengetatan anggaran meliputi pemangkasan belanja, peningkatan pajak, atau campuran keduanya (Farneubun, 2016). Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan *austerity* bertujuan untuk mengurangi tingginya angka pengangguran yang terjadi di Eropa dan menjadi masalah internal dalam Uni Eropa.

Austerity (Liesindriyati, 2013), yang dimaknai sebagai kebijakan pemangkasan belanja negara dibarengi kenaikan pajak dalam rangka menekan defisit anggaran, dianggap sebagian kalangan hanya akan memperburuk krisis Eropa yang persoalan utamanya adalah krisis utang dan perbankan. Penganut Keynesian meyakini, krisis ekonomi hanya bisa diatasi dengan menggelontorkan stimulus fiskal dengan menggenjot belanja negara untuk menggerakkan ekonomi. Jerman, yang merupakan perekonomian terkuat zona euro, menentang penggunaan stimulus karena stimulus fiskal hanya bisa dilakukan dengan cara menambah utang. Mengatasi krisis utang dengan menambah utang hanya akan kian memperparah krisis utang Eropa.

Kebijakan *austerity* (Musafir, 2011) sendiri sekaligus dimaksudkan untuk mendisiplinkan negara anggota yang selama ini serampangan dalam belanja anggaran, sebagaimana tecermin dari pembengkakan defisit yang dibiayai dengan utang. Dari 28 negara Uni Eropa, hanya Jerman yang defisit anggarannya di bawah 3 persen, seperti disyaratkan Uni Eropa. Negara lain, termasuk Perancis dan Italia (perekonomian kedua dan ketiga terbesar), jauh di atas 3 persen. Setelah enam tahun berjuang keluar dari krisis

ekonomi, stabilitas finansial memang mulai terlihat di zona euro. Namun, perekonomian yang saat ini telah digambarkan oleh pertumbuhan dan pengangguran yang melanda Uni Eropa, masih mengalami penekanan. Pertumbuhan secara keseluruhan di 18 negara pengguna euro memang mulai positif awal 2013. Namun pergerakan ini masih tak cukup kuat dikarenakan masih berada di bawah 1 persen. Bahkan belum ada kesepakatan apakah ekonomi kawasan ini telah keluar dari resesi, mengingat beberapa negara anggota masih resesi. Arah kebijakan Uni Eropa ke depan akan bergantung pada bagaimana para pemimpin Eropa melihat situasi ekonomi saat ini dan sejauh mana kebijakan yang sudah ditempuh dapat memperbaiki fundamental perekonomian kawasan (Kompas, 2014).

Eropa menjalankan *austerity* measures - dengan memotong belanja pemerintah dan menaikkan pajak - pada saat ekonomi mereka masih rapuh. Hal ini memberikan tekanan kepada rumah tangga dan sektor bisnis sehingga mereka terpaksa mengurangi belanja mereka yang berakibat timbulnya lingkaran setan *austerity-recession*. Sementara Amerika Serikat memilih menunggu hingga ekonominya mulai pulih sebelum mereka mengetatkan kebijakan fiskalnya. Dengan demikian pada saat pengetatan dimulai, sektor perbankan sudah lebih kuat dan deleveraging (pengurangan utang) di pihak swasta juga sudah mereda. *Austerity* menyebabkan kerusakan ekonomi yang lebih parah di Eropa karena negara-negara di zona Euro saling bergantung satu sama lain dalam hal perdagangan dan mereka melakukan *austerity* measures secara bersamaan. Dengan demikian ekspor di negara-negara Eropa sama-sama anjlok dan semua mengalami resesi (Iskandar, 2014).

Pengetatan ekonomi Eropa menjadi sebuah proses kebangkitan partai-partai ekstrem kanan yang ada di Eropa. Karena dengan adanya pengetatan ekonomi tersebut banyak negara-negara di Eropa yang akan semakin terpuruk dalam

perkembangan perekonomiannya. Dan disaat inilah banyak masyarakat yang mulai mengeluhkan mengenai kebijakan *austerity* tersebut sehingga para tokoh politik konservatif menjadikannya sebagai momentum kebangkitan dengan menjadi perwakilan masyarakat yang kecewa dan tidak terima akan kebijakan tersebut. Banyaknya negara-negara di Eropa yang mengalami *bail out* setelah diberlakukannya kebijakan tersebut menjadi poin utama bagi masyarakat untuk meminta kepada dewan konstitusi Eropa untuk menghilangkan kebijakan tersebut.

Dan bagi para tokoh elit empat partai konservatif juga adanya kebijakan pengetatan anggaran dinilai sama saja dengan adanya penghapusan kedaulatan negaranya yang seharusnya mempunyai akses penuh dalam perekonomian negaranya masing-masing. Negara yang pertama kali menolak adanya kebijakan *austerity* tersebut ialah Inggris sebelum keluar dari Uni Eropa (*brexit*) serta Perancis dan Italia yang menjadi negara nomor dua dan tiga sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Uni Eropa.

Karena dampak beruntun yang terjadi dalam permasalahan internal Uni Eropa sangatlah berkaitan antara satu sama lain, sebab jika angka pengangguran yang semakin lama semakin meninggi dan ditambah adanya kebijakan pengetatan anggaran oleh dewan konstitusi akan semakin memperburuk perekonomian negara-negara di Uni Eropa itu sendiri. Hal itu disebabkan oleh adanya ketergantungan ekonomi antara negara satu dengan negara yang lainnya dan harus siap menerima konsekuensi *bail out* dari Uni Eropa.

3. Anti-Euro

Sebelum krisis ini terjadi, perjalanan sejarah Uni Eropa sebenarnya nyaris penuh dengan keberhasilan. Tahun 1995 hampir seluruh negara Eropa Barat bergabung. Tahun 1998 sistem keuangan Eropa terintegrasi dalam mata uang

tunggal: Euro. Tahun 2004 bertambah lagi 10 negara anggota baru. Mereka adalah negara-negara ex-komunis Eropa Timur. Ini menjadikan Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia sekaligus menjadi contoh organisasi regional terbaik di dunia. Wajar saja kalau keberadaannya dikagumi oleh organisasi regional manapun di dunia. Bahkan pada tahun 2012 Uni Eropa mendapatkan hadiah Nobel untuk perannya menyatukan benua biru tersebut (Kusumawardhana, 2013)

Saat ini isu lain yang menjadi masalah internal di Eropa tahun 2010-2016, ialah munculnya Gerakan Anti Eropa yang semakin kuat, hal itu dikarenakan banyaknya kekecewaan yang timbul dikalangan masyarakat Eropa akan kebijakan-kebijakan yang dibuat selama tergabung dalam Uni Eropa. Krisis mata uang Euro, naiknya angka pengangguran dan ancaman datangnya resesi membuat sentimen anti Eropa meningkat. Partai anti Uni Eropa atau kelompok-kelompok sayap kanan makin banyak meraih simpati pemilih di sejumlah negara anggota. Seperti yang dilakukan partai AfD Jerman yang menggunakan permasalahan Euro sebagai cara dalam menarik simpati masyarakatnya untuk mendukung partai tersebut dalam pemilu mendatang (DW, 2014).

“Bersama-sama dengan pihak yang terwakili di sini, kami ingin putra-putra Eropa dari tanah air yang bebas,” kata Frauke Petry, pemimpin kelompok Alternatif anti-imigrasi Jerman (AFD) (Wiratama, 2017).

Ketidakpuasan terhadap Uni Eropa serta gagasan akan integrasi Eropa yang menjadi tujuan utama terbentuknya Uni Eropa kini makin meningkat. Dari ketidakpuasan tersebut petinggi-petinggi Eropa mencoba untuk menanggapi dengan kebijakan politik pengetatan anggaran (*austerity*) malah membuat sentiment anti-Eropa malah semakin kencang. Dalam pemilihan umum di sejumlah

negara anggota, terlihat dengan tegas partai-partai yang skeptis terhadap gagasan Eropa serta partai berhaluan kanan, berhasil meraih simpati pemilih. Partai-partai berhaluan populis juga memanfaatkan situasi krisis untuk dapat menduduki kursi parlemen yang ada di Eropa.

Di Inggris, Jerman, Perancis, Belanda dan Denmark partai skeptis-Eropa dan partai ekstrim kanan meraih kepercayaan yang cukup signifikan dalam pemilu parlemen Eropa maupun di tingkat nasional. Sementara di negara yang dilanda krisis keuangan dan beban hutang yang tinggi, seperti Hungaria dan Yunani malah lebih memudahkan untuk partai-partai berhaluan kanan dalam meraih suara-suara yang ada dalam memantapkan posisinya.

Di Spanyol dan di Inggris juga menggelar referendum untuk menyempal para petinggi-petinggi Uni Eropa, dikarenakan adanya rasa tidak puas dengan pemerintah pusat yang pro-Eropa yang dituding menjadi penyebab ambrohnya ekonomi di Spanyol. Kejutan lainnya yang muncul di Inggris sebelum melakukan referendum dari Uni Eropa, partai anti Uni Eropa-UKIP berhasil meraih dua kursi di parlemen dalam pemilu nasional di Inggris, Kemenangan partai anti Eropa itu merupakan sinyal penting yang serius menjelang pemilu nasional kedepan di Inggris (DW Indonesia, 2014).

Perahian suara sekitar 20% yang didapat oleh Marine Le Pen sebagai pemimpin Partai Front Nasional di Perancis telah membuktikan bahwa masyarakat di Eropa sekarang mulai bergerak secara perlahan-perlahan kearah gerakan anti-euro karena kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh gerakan anti-euro dinilai dapat mengembalikan tatanan social serta keamanan nasional negara-negara di Eropa.

Calon presiden Marine Le Pen dari Partai Front Nasional sudah berjanji untuk menyelenggarakan referendum yang menuntut Perancis keluar dari Uni Eropa dan pemberlakuan mata uang tunggal dalam enam bulan pertamanya jika terpilih sebagai presiden menggantikan Francois Hollande pada pemilihan umum mendatang (Setiawan S. R., n.d.). Hal ini tidak hanya terbukti di Perancis, seperti halnya Perancis Negara lainnya di eropa yaitu Belanda juga membuktikan bahwa gerakan anti-euro sudah menyebar keseluruh penjuru di Eropa, tokoh yang juga terkenal akan kebijakannya yang anti-euro, ialah Geert Wilders.

Setelah pembahasan pengetatan anggaran antara koalisi yang dipimpin Perdana Menteri, Mark Rutte dan kubu Euroskeptis bersama dengan Geert Wilders yang merupakan pemimpin Partai Kebebasan yang anti-Islam (PVV) akhirnya berhasil mengubah skenario politik di Belanda. Wilders, yang pernah menyamakan Alquran dengan Mein Kampf karya Hitler, bagi Wilders partainya tak bisa sejalan dengan tuntutan para petinggi Uni Eropa. Hal itu dikarenakan alasan adanya pemotongan anggaran demi memenuhi target Uni Eropa sebab kebijakan tersebut hanya akan menyusahkan kaum manula dan pensiunan, sebagai kelompok yang paling terdampak. Dulu negara-negara di inti Eropa cemas dengan tren pemilu negara-negara tepi eropa akan menjurus pada anti-Euro (Pitakasari, 2012) .

4. Fenomena Euroscepticism

Euroscepticism yang diartikan dalam kamus internasional sebagai Kelompok Oposisi terhadap skeptisisme atau kekuasaan yang ada di Uni Eropa saat ini (Kamus Internasional, 2017). Istilah *eurosceptic* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk orang-orang Eropa yang meragukan keberadaan Uni Eropa, *eurosceptic* berasal dari dua kata yang digabungkan menjadi satu yaitu Euro dan Skeptic, Euro memiliki arti Eropa, dan Skeptic memiliki arti

orang yang suka meragui sesuatu, maka secara sederhana *euroseptic* dapat diartikan dengan orang-orang Eropa yang meragukan atau menolak adanya integrasi di Eropa. Sedangkan jika merujuk pada kamus Cambridge, *euroseptic* memiliki arti : kata benda, yaitu berupa seseorang, terutama politikus, yang menentang hubungan dekat antara Inggris dan Uni Eropa (Repository UMY , 2016).

Eurosepticism yang merupakan istilah yang menyatakan pandangan maupun kepercayaan skeptis terhadap integrasi Uni Eropa tersebut. Data survey Eurobarometer dari tahun 1990 hingga 2011 menunjukkan adanya peningkatan persepsi publik yang mengatakan bahwa unifikasi negara terhadap Uni Eropa adalah hal yang buruk. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pandangan skeptis terhadap Uni Eropa diantaranya adalah ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, ketidakpercayaan terhadap institusi supranasional, kekhawatiran terhadap hilangnya identitas nasional, dan refleksi terhadap kepentingan pribadi. *Eurosepticism* pada dasarnya didorong oleh kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang dianggap merugikan negara anggota (Tidore, 2017).

Eurosepticism semakin meningkat ketika krisis ekonomi melanda Uni Eropa sehingga rakyat Eropa mulai menyalahkan European Central Bank (ECB) atas intervensi yang dilakukan dalam mengatur kebijakan fiskal negaranya seperti kebijakan mengenai standar pembayaran pajak, upah pensiun hingga lapangan pekerjaan. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan asas demokratis mengingat anggota parlemen Uni Eropa yang membuat kebijakan pada dasarnya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat Uni Eropa itu sendiri, melainkan oleh politikus elit di pemerintahan.

Ditambah lagi banyaknya permasalahan-permasalahan internal yang terjadi didalam Uni Eropa itu sendiri semakin menguatkan fenomena *euroseptic* sebagai fenomena yang muncul dikarenakan adanya kekecewaan yang dialami oleh masyarakat eropa. Sejak tergabungnya negara-negara di Uni Eropa banyak kebijakan yang dinilai skeptis oleh para tokoh politik ataupun individu-individu lainnya seperti bertambahnya angka pengangguran di seluruh negara di Eropa karena banyaknya persaingan tidak sehat yang dilakukan sesama negara anggota ditambah dengan munculnya kebijakan *austerity* yang menjadikan negara-negara yang sebelumnya saling bergantung satu sama lain kini malah mengalami krisis ekonomi yang sangat buruk disebabkan adanya resesi ekonomi negara tersebut.

Dan dari adanya permasalahan tersebut menjadikan fenomena *euroseptic* di kalangan masyarakat eropa juga sering dikaitkan dengan kegagalan penyatuan eropa yang dinilai belum mampu membuat sistem yang dapat menjangkau seluruh negara anggotanya. Marine Le Pen yang pada saat kampanyenya dalam pemilihan umum di Perancis mengajak negara anggota lainnya untuk dapat melihat dan menjadikan contoh kebebasan Inggris (*brexit*) sebagai proses pengambilan kembali kebebasan yang telah diambil sejak negara bergabung dalam Uni Eropa.

“Kemenangan bagi kebebasan. Seperti yang telah saya minta selama bertahun-tahun, kita sekarang harus menggelar referendum yang sama di Perancis dan negara UE lainnya,” kicau pemimpin sayap kanan Perancis, Marine Le Pen, di akun Twitter resminya (Kompas Cyber Media, 2016).

Di Belanda, seperti halnya juga di Perancis - salah satu dari enam negara pendiri komunitas Eropa itu-tokoh anti-Islam dan anti-imigran, Geert Wilders, mengucapkan selamat kepada warga Inggris atas “Hari kemerdekaan”

mereka keluar dari UE. Hal itu merupakan upaya atau cara Wilders dalam mengajak paara individu-individu di eropa untuk bangkit dan mendukungnya menjadi perwakilan aspirasi masyarakat eropa terkhusus di Belanda.

“Rakyat Belanda layak juga menggelar referendum. Oleh sebab itu Partai Kebebasan (PVV) menuntut referendum Nexit, Belanda keluar keluar UE,” kata Wilders (Kompas Cyber Media, 2016)

Kemudian dari negara besar lainnya juga muncul ajakan kepada warga negaranya untuk menjadikan fenomena brexit di Inggris sebagai cara paling efektif dalam mengambil kembali kedaulatan yang dirasa telah diambil oleh Uni Eropa. Matteo Salvini sebagai salah satu tokoh politik paling menonjol dari partai ekstrem kanan tersebut ikut mengajak seluruh masyarakat di Italia agar mencoba untuk melakukan referendum kepada Uni Eropa seperti yang dilakukan oleh Inggris. Matteo Salvini, juga memuji hasil referendum Inggris. Salvini mendesak agar apa yang dilakukan rakyat Inggris pantas menjadi contoh yang harus diikuti oleh Italia.

B. Faktor Eksternal Di Eropa Tahun 2010-2016

Selanjutnya ada juga faktor-faktor lainnya yang menjadi pendukung dalam proses kebangkitan empat partai konservatif ialah salah satunya berasal dari berbagai permasalahan ektsternal yang datang kedalam Uni Eropa seperti semakin banyaknya migran-migran non-eropa yang mencoba masuk kedalam negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencari keamanan dibandingkan dengan negara asalnya yang mayoritas ialah negara konflik diaman konsep gerakan sosial (*social movement*) menjadi konsep yang menjelaskan hal tersebut.

Dan dari banyaknya imigran-imigran yang dapat masuk dan mendapat perlindungan di negara Uni Eropa sebagai bentuk perlindungan hak asasi yang menjadi topik

utama dalam perpolitikan dunia, malah mendapat perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat yang tidak terima dengan adanya imigran Muslim di negaranya. Lalu dengan adanya sikap diskriminatif tersebut mengakibatkan kelompok yang minoritas tersebut melakukan aksi perlawanan namun dinilai sebagai aksi terorisme yang menyebabkan permasalahan tersebut semakin tidak dapat diselesaikan dan menjadi fenomena baru dalam negara di Uni Eropa yaitu *Islamophobia*.

1. Meningkatnya Imigran-Imigran Non Eropa

Banyaknya peperangan-peperangan serta konflik yang terjadi di Negara-Negara Islam di Timur Tengah mengakibatkan banyaknya warga-warga Muslim yang mencari tempat-tempat baru yang dirasa aman untuk di tinggali sehingga memaksa warga-warga Muslim untuk bermigrasi ke negara-negara di Eropa. Dari kejadian tersebut berkaitan dengan konsep gerakan sosial (*social movement*) yang menggambarkan resistensi suatu kaum / kelompok yang memperjuangkan tidak hanya isu sosial, politik, dan ekonomi, tetapi meluas mencakup isu HAM dan kebebasan individu, pengaruh globalisasi dan lain sebagainya. Dengan banyaknya imigran-imigran non-eropa yang datang ke Negara-Negara di Eropa membuat sebuah permasalahan yang melanda di Negara-Negara di Eropa.

Isu tersebut juga sering dijadikan oleh para tokoh-tokoh elit sayap kanan untuk menarik partisipan-partisipan baru bagi partai mereka. Seperti yang dikemukakan partai AfD di Jerman, Partai Alternatif untuk Jerman semula menuntut dibubarkannya zona mata uang Euro. Untuk menarik simpati banyak pemilih, AfD memilih retorika sebagai partai populis kanan dan memberi tekanan khusus pada program anti Islam. AfD juga gelar kampanye anti Yahudi dan sentimen rasisme. Inilah resep yang membuat AfD sukses meraih kursi di parlemen Jerman dan parlemen Eropa (DW, 2013).

Ia merasa dengan adanya 1,1 juta pengungsi yang masuk ke Jerman, ia mengatakan *“People must stop migrants from crossing illegally from Austria [into Germany],” she said in an interview with a regional newspaper. “If necessary, [they] should use firearms. I don’t want this, but the use of armed force is there as a last resort”* (Connolly, 2016). Ia mengajak seluruh masyarakat Jerman untuk tidak memberikan kesempatan bagi para pengungsi yang menebarkan teror di Jerman, ia bahkan siap menggunakan cara kekerasan yaitu dengan memperbolehkan penggunaan senjata api terhadap para imigran ketika melakukan kegiatan yang dinilai dapat mengancam keamanan negara.

Isu Identitas Nasional yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat Eropa membuat banyak kalangan di Eropa yang awalnya sangat mengutamakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia seperti yang biasa di usung oleh para partai sayap kiri liberal sebagai proses pendemokrasian negara-negara di Eropa. Namun seiring berjalanya waktu ideology liberal seakan perlahan-lahan mulai memudar dikarenakan adanya ketakutan masyarakat Eropa terhadap kewanasan nasional dan identitas nasional yang dimilikinya (Jazilah.MM, Susilo, & Eriyanti, 2012).

Di Belanda juga ada Geert Wilders sebagai tokoh politik sayap kanan yang telah hidup di persembunyian sejak seorang militan Islamis membunuh produsen film Belanda Theo Van Gogh pada 2004. Dia bertekad untuk melarang masuknya warga Muslim, menutup semua masjid, dan menarik keanggotaan Belanda dari Uni Eropa (Manan, 2016). Geert Wilders yang sangat terkenal akan sikap anti-Muslim dan anti-euro selalu mengupayakan cara agar seluruh masyarakat di Belanda dan Eropa dapat memperhitungkan kembali sikap pemerintah Uni Eropa yang menerima para imigran-imigran tersebut.

Di Perancis juga sebagai negara yang paling terdampak akan isu radikalisme islam tersebut telah mulai terlihat adanya rencana kebijakan nasional negara tersebut dalam menyelesaikan permasalahan imigran non-eropa seperti yang dikemukakan Marine Le Pen "*Mass immigration is not an opportunity for France, it's a tragedy for France*" (Kettley, 2016). Yang artinya "Imigrasi massal bukanlah kesempatan bagi Perancis, ini adalah tragedi bagi Perancis." Karena bagi Le Pen dengan banyaknya imigran-imigran Muslim akan berdampak kepada hilangnya identitas nasional Perancis seperti yang terdapat dalam paham konservatif.

Berdasarkan data yang ada, data pertumbuhan masyarakat Muslim di Eropa telah menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan di dataran Eropa. Data statistik terakhir mengenai demografis Eropa menunjukkan bahwa orang Islam di Eropa (Uni Eropa) berjumlah 4% dari total penduduk Eropa atau sekitar 23 juta pada tahun 2003 meski data yang tercatat sekitar 15.5 juta. Presentase ini jauh lebih besar di Eropa Barat di mana pertumbuhan populasi Muslim sungguh cepat. Padahal pada tahun 1982, populasi Muslim di Eropa hanya 6.8 juta atau 1.6 %. Bahkan tiga dekade sebelumnya yakni sekitar tahun 1950, populasi Muslim berada dibawah 0,5%. Jumlah ini sungguh sangat kecil bila dibandingkan dengan populasi minoritas lainnya seperti Yahudi dan Gipsi, namun, selama kurun waktu tiga dekade ini, telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah populasi Muslim di Eropa.

Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, 30% di Asia Selatan yakni Pakistan, India dan Bangladesh. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang

signifikan di Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tengah, dan Rusia. Dalam tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah, selalu disebut bahwa Kristen adalah agama terbesar di dunia. Hari ini, sebutan itu tidak berlaku lagi. Tetapi bila dicermati pemeluk agama Islam ternyata paling besar di dunia. Jumlah penduduk dunia tahun 2013 adalah 7.021.836.029. Sebaran menurut agama adalah: Islam 22.43%, Kristen Katolik 16.83%, Kristen Protestan 6.08%, Orthodox 4.03%, Anglikan 1.26%, Hindu 13.78%, Buddhist 7.13%, Sikh 0.36%, Jewish 0.21%, Baha'i 0.11%, Lainnya 11.17%, Non Agama 9.42%, dan Atheists 2.04% (www.30 days.net, 2013). Bahkan dikatakan bahwa jumlah pemeluk Islam pada tahun 2012 adalah 2.1 milyar. Sedangkan jumlah pemeluk Kristen dan Protestan adalah 2 milyar.

Sehingga Islam saat ini, kendati dibandingkan dengan pemeluk Kristen dan Protestan sekalipun, sudah menjadi agama terbesar di dunia (www.religiouspopulation, 2012). Penduduk dunia tahun 2011 tumbuh 137% dalam satu dekade terakhir, di mana Kristen tumbuh sebanyak hanya 46%, sebaliknya, Islam tumbuh sebanyak 5 kali lipat: 235%. (The Almanac Book of Facts, 2011). Dikatakan, bila tren pertumbuhan ini terus berlangsung, diperkirakan pada tahun 2030, 1 dari 3 penduduk dunia adalah orang Islam. (www.Muslimpopulation.com, 2011). Dilihat per benua, menurut data UN tahun 2012, sejak tahun 1989 sampai tahun 2012, perkembangan jumlah pemeluk agama Islam yang paling cepat terjadi di Australia dan Oceania/Pacific 257.01%; kemudian berturut-turut diikuti oleh Eropa 142.35%; Amerika 25%; Asia 12.57%; Afrika 2.15%; dan Amerika Latin 4.73% (www.30-days.net, 2012). Menurut (The Almanac Book of Facts, 2011), dalam sepuluh tahun terakhir, penduduk dunia bertambah sebanyak 137%. Di mana pemeluk agama Kristen bertambah sebanyak 46%. Sedangkan pemeluk agama Islam bertambah sebanyak 235% (www.geocities.com, 2012).

Sehingga disimpulkan bahwa Islam adalah agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tertinggi di dunia, setiap tahunnya. Antara 1990 sampai 2000, diperkirakan sekitar 12.5 juta orang dari berbagai agama, pindah ke agama Islam. (Guinness Book of World Records, 2011). Perkembangan Islam yang sangat cepat ini disebabkan oleh dua faktor penting. Pertama, oleh tingkat kelahiran (fertility rate) yang tinggi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Kedua, oleh jumlah orang-orang yang pindah (conversion) dari agama lain ke agama Islam yang juga tinggi, terutama di Amerika, Eropa dan Australia dalam 20 tahun terakhir (The Almanac Book of Facts, 2011). Menurut hasil poll tahun 2012 di Amerika, diketahui sekitar 200.000 orang setiap tahunnya pindah dari agama Kristen ke agama Islam (www.usislam.org, 2012). Sebuah studi oleh Faith Matters pada tahun 2011 di Inggris, diketahui bahwa dalam 10 tahun terakhir, diperkirakan jumlah orang Inggris yang pindah dari agama lain (Kristen) menjadi pemeluk agama Islam adalah sebanyak 5.000 orang setiap tahun (<http://insideislam.wisc.edu>, 2011). Terkait dengan perkembangan Islam yang cepat ini, menurut CNN, pemeluk Kristen semakin tidak meyakini kebenaran ajaran agama mereka. Sebaliknya pemeluk Islam, keyakinan terhadap kebenaran agama mereka semakin meningkat.

Dalam empat dekade mendatang, Islam diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan agama besar lainnya di dunia, dengan populasi Muslim yang hampir menyamai Kristen baik dalam jumlah maupun persentase dalam populasi global, menurut perkiraan-perkiraan yang dirilis pekan lalu. Kristen akan tetap menjadi kelompok agama terbesar, meningkat menjadi 2,92 miliar penganut pada 2050 jika tren-tren demografis saat ini berlanjut. Namun jumlah Muslim akan mencapai 2,76 miliar orang, membuat masing-masing kelompok akan mencakup 30 persen populasi dunia, menurut para analis dari Pew Research Center said.

Proyeksi-proyeksi dalam laporan “Masa Depan Agama-Agama Dunia” itu didasarkan pada angka kelahiran dan kematian, pola imigrasi dan tingkat kepindahan agama, di antara informasi lain yang ditemukan dalam sensus-sensus, survei demografi dan laporan tambahan yang menyangkut orang-orang untuk mengidentifikasi agama yang mereka anut. Pertumbuhan agama Kristen dan Islam akan banyak terjadi di Afrika. Namun Muslim juga akan tumbuh untuk mencakup 10 persen populasi Eropa dan akan melebihi jumlah Yahudi di Amerika Serikat pada pertengahan abad. India diperkirakan akan tetap dengan mayoritas Hindu, namun negara itu akan melewati Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai sebuah kelompok, Muslim lebih muda dan memiliki lebih banyak anak dibandingkan umat agama lain, mendorong pertumbuhan global mereka, menurut para peneliti. (Islam, 2015)

Hal inilah yang menimbulkan ketakutan kepada seluruh petinggi-petinggi di Eropa dalam menatap perkembangan umat Muslim. Terlebih arah pertumbuhan tersebut telah mengarah ke wilayah-wilayah di Eropa yang dikenal sebagai kiblat utama umat kristiani dan juga menjadi pilar terbesar pendukung Negara-Negara barat saat ini. Dengan ketakutan tersebut sangat bersinergi dengan sikap masyarakat di Negara-Negara Eropa yang merasa terancam dengan banyaknya masyarakat yang non-eropa masuk ke Eropa dan mengusik identitas nasional serta keamanan nasional di Negara-Negara Eropa. Berikut ini adalah tabel yang mendata masuknya imigran Ilegal di 4 negara di Eropa yaitu Italia, Spanyol, Malta dan Yunani sebagai Negara yang pernah mengalami krisis ekonomi di Eropa (Inglehart, 2004).

Gambar 4.B.7. Tabel Imigran Ilegal Yang Masuk Eropa










Year	Country of arrival			
	Italy	Spain	Malta	Greece
1998	38,142	n.a.	n.a.	n.a.
1999	49,136	3,569	n.a.	n.a.
2000	26,817	15,199	n.a.	n.a.
2001	20,143	18,510	n.a.	n.a.
2002	23,719	16,670	n.a.	n.a.
2003	14,170	19,176	n.a.	n.a.
2004	13,635	15,671	n.a.	n.a.
2005	22,939	11,781	n.a.	n.a.
2006	22,016	39,180	n.a.	n.a.
2007	20,455	18,056	n.a.	n.a.
2008	36,951	13,424	2,704	n.a.
2009	9,573	7,285	1,173	n.a.
2010	4,406	3,632	28	4,084
2011	62,692	5,441	1,574	7,216
2012	8,717	3,804	2,010	n.a.
2013	35,085	3,000	1,335	n.a.

Sumber:

<http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC-RR-2013-009.pdf>

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Italia sebagai Negara yang merupakan salah satu dari Negara-Negara yang ada di Uni Eropa dengan memiliki bibir pantai terpanjang menempati nilai terbanyak setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan Italia memiliki pintu-pintu masuk seperti pelabuhan, bandara, dll di setiap pulau-pulau yang ada di wilayahnya membuat Italia menjadi Negara paling dituju oleh para imigran gelap yang ingin masuk ke Uni Eropa. Imigran-imigran tersebut tidak hanya dari wilayah Timur Tengah melainkan dari Benua Afrika yang juga tengah mengalami masalah-masalah seperti kekeringan, kelaparan ataupun kemiskinan.

Gambar 4.B.8 Jumlah Pengungsi Non-Eropa Tahun 2014

Negara Asal	Jumlah
 Suriah	79,169
 Eritrea	34.586
Negara-negara sub-Sahara	26.341
 Afghanistan	22.132
 Kosovo	22.069
 Mali	10.575
 Albania	9.323
 Gambia	8.730
 Nigeria	8.715
 Somalia	7.676
Lainnya	54.216
Jumlah	283.532

Sumber: Frontex, Annual Risk Analysis 2015
(Chrissandi, 2016)

2. Serangan Kelompok Militan Islam

Banyaknya serangan-serangan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok militan Islam dalam memerangi perilaku diskriminasi pemerintah Perancis juga menjadi salah satu indikator penyebab kelompok sayap kanan dapat kembali menguasai percaturan politik di Negara-Negara di Eropa. Seperti halnya program-program yang terdapat dalam 144 program Marine Le Pen (Marine, 2017) pada pemilu di Perancis, ia berharap agar seluruh masyarakat dapat mengikuti program yang terdapat pada poin ke 28 hingga ke 33 dimana pada poin tersebut Marine Le Pen sangat menekankan isu fundamentalis islam yang kemudian dikaitkan kepada isu terorisme.

Ia juga berjanji akan melarang dan membubarkan organisasi apapun yang berhubungan dengan fundamentalis Islam. Mengusir semua orang asing terkait dengan fundamentalisme Islam dan dalam poin selanjutnya Marine Le Pen juga dengan serius akan menutup semua masjid ekstrimis yang mana nantinya akan diidentifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan melarang dana asing dari tempat ibadah dan staf mereka.

Terlebih paska penyerangan di Paris yang menewaskan sekitar 128 orang tewas dan 200 cedera dalam serangan terkoordinasi di berbagai lokasi di kota Paris pada November 2015 (Islamnesia, 2015). Le Pen mengatakan pada seluruh media *"We are living the horror, yesterday evening the centre of France was struck by an exceptional barbarity. It was an escalation of Islamist terrorism and the sixth time this year that Islamists have attacked our country"* (Willsher, 2015), Le Pen bertujuan untuk memprovokasi seluruh masyarakat Perancis dengan aksi serangan tersebut karena bagi Le Pen kelompok "Ekstremisme Islam harus dihancurkan," dan dengan cara tersebut ia mendapat dukungan penuh masyarakat sebagai orang yang memperhatikan keresahan akan serangan tersebut.

Inilah mengapa banyak sekali serangan-serangan teror yang terjadi menjadi bahan pempolitisasian para tokoh konservatif di Eropa. Begitu juga ketika serangan terjadi di London, 2005 dan Brussel, 2014 tokoh konservatif lainnya yaitu Geert Wilders dari Partai PVV Belanda mengajak seluruh masyarakat Belanda agar dapat melihat kejadian tersebut sebagai salah satu contoh yang akan terjadi apabila Belanda masih tetap memberikan kesempatan bagi kelompok fundamentalis islam untuk berkembang di Belanda dan Eropa.

Geert Wilders juga menyampaikan pesannya kepada media saat wawancaranya kepada telegraph.uk *“What you see happening now is what we saw happening after Brexit,” and “Despite all the hate and fear-mongering of the elite, both in Britain and in Brussels, the people took their fate in their own hands”* (Boztas, 2017). Wilders mengingatkan bahwa yang terjadi di Inggris dan Belgia bukan semata-mata tindak kejahatan biasa melainkan cara kelompok ekstrem islam dalam merebut identitas nasional dari masyarakat eropa.

Wilders juga menekankan bahwa serangan tersebut dapat diselesaikan dengan cara memberikan dukungan kepadanya dalam pemilu Belanda mendatang karena menurut Wilders, lemahnya sikap pemerintah Belanda dalam membendung kedatangan imigran Muslim dapat berdampak kepada serangan terorisme yang telah terjadi di negara-negara Eropa lainnya. Betapa bahayanya jika negara yang menempati 3 besar dalam perekonomian di Uni Eropa akan mengalami serangan teror yang dapat mengakibatkan negara tersebut menjadi krisis keamanan nasional.

Berbeda halnya dengan Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang lebih memilih cara dalam memanfaatkan serangan-serangan teror yang terjadi di hampir seluruh kota besar di negara anggota Uni Eropa. Partai AfD bersama

ketua partainya Frauke Petry mengadopsi sebuah manifesto baru yang kontroversial yang menyerukan pelarangan menara, kerudung untuk wanita dan panggilan Muslim untuk sholat (adzan). "*Islam bukanlah bagian dari Jerman,*" partai tersebut mendeklarasikan dalam manifesto pertamanya untuk pemilihan nasional. (Justin Huggler, 2016)

3. Fenomena Islamophobia

Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Qobidl 'Ainul Arif dalam bukunya yang berjudul "*Politik Islamophobia Eropa*" bahwa Islamophobia adalah perasaan ketakutan atau kebencian terhadap Islam, orang – orang Islam (Muslim) maupun budaya Islam. Istilah ini muncul pertama kali dalam kurun waktu tahun 1922 dalam sebuah esai seorang orientalis bernama Etienne Dinet dalam karyanya yang berjudul *L'Orient vu del'Occident*. Islamophobia kemudian menjadi istilah yang umum digunakan pada tahun 1990an untuk mendefinisikan perlakuan diskriminasi yang diterima oleh umat Muslim di Eropa Barat (Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, 2014). Meskipun berbagai macam definisi mengenai Islamophobia namun semua persepsi tersebut tetap saja mengarah ke satu ideology tentang ketakutan yang tidak rasional terhadap Islam. Dan dari persepsi inilah memunculkan cap akan setiap umat Muslim adalah seorang yang fanatif dengan agamanya dan dapat melakukan tindakan kekerasan kepada orang – orang non-Muslim dan meyakini bahwa Islam menolak akan nilai – nilai yang ada di Negara barat seperti kesetaraan, toleransi, dan demokrasi.

Di tahun 1997, the Runnymede Trust, sebuah kelompok think-tank Inggris yang sangat berpengaruh menerbitkan sebuah laporan berjudul "*Islamophobia: A Challenge for Us All.*" Dalam laporan tersebut disebutkan ada sikap kebencian dan permusuhan terhadap Islam karena itu masyarakat Eropa tidak menyukai semua kelompok Muslim. Fenomena ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1970.

Sikap Islamofobia di Eropa terlihat jelas pada Partai British National Party (BNP) di Inggris, yang menggunakan isu sebagai kampanye politik. Di Belanda Geert Wilders juga menggunakan cara-cara seperti ini dalam pemilihan anggota parlemen bagi partainya, Party For Freedom (PVV), atau Partij voor de Vrijheid. Begitu pula di negara tetangganya, Belgia dan Swedia juga menampakkan gejala serupa (Nurdin, 2015).

Demikian pula di Perancis Partai Front National yang dipimpin oleh Marine Le Pen dengan jelas menyuarakan akan sikap anti-islamnya terbukti dari 144 manifesto program-program Le Pen (Marine, 2017) dalam pemilihan umum di Perancis. Marine Le Pen juga menambahkan pada Huffington Post "*Untuk memberantas terorisme dan melanggar jaringan fundamentalis Islam*" - "*Eradiquer le terrorisme et briser les réseaux fondamentalistes islamistes*" (Huffington Post, 2016). Le Pen menjelaskan akan menerapkan sikap keras terhadap Muslim di Perancis sesuai dengan programnya yang terdapat pada poin 25-35 karena bagi Le Pen Muslim hanya dapat memberikan teror kepada masyarakat Perancis kedepannya.

Partai Lega Nord Italia yang dipimpin oleh tokoh politik sayap kanan Matteo Salvini juga menekankan bahwa fenomena Islamophobia telah mengakibatkan adanya perang identitas dan kebudayaan, seperti yang ia katakan pada laporan berita Breitbart.com yang berjudul "*Europe 'Soft', Islam Incompatible with Our Values*". Salvini mengatakan "*Europe is losing its values and identity, it's lacking security and has lost its sense of pride*", Salvini said, and spoke of a "*culture war*" taking place on the continent" (Hale, 2017). Dimana Salvini mencoba berbicara mengenai "perang budaya" yang terjadi di benua Eropa. Karena banyak proses multikulturalisme yang dilakukan umat Muslim dinilai terlalu ekstrem dan sangat fundamentalis.

Sebagaimana Inggris, Perancis maupun Spanyol, hal yang sama juga terjadi terhadap komunitas Muslim di Jerman, sikap diskriminasi ini ditunjukkan oleh warga Jerman dengan melakukan pelarangan pada kelompok Muslim untuk membangun menara masjid kecil yang tingginya 8 meter. Editorial koran Saarbrücker Zeitung menyebutkan. “Menara ini tidak boleh didirikan, karena menara menyimbolkan pencarian Islam akan kekuasaan. Menara awalnya dipakai sebagai menara jaga, namun kemudian menjadi simbol keagamaan. Lalu diikuti dengan pencaplokan wilayah-wilayah dengan kekerasan, menara dibangun sebagai manifestasi kekuasaan Muslim.” Demikian, editorial menggambarkan sikap sebagian masyarakat Jerman terhadap Islam maupun Muslim. Sikap kebencian negara-negara Barat ini terhadap Islam maupun kaum Muslimin sampai pada puncaknya di Amerika ketika sekelompok orang di Amerika Serikat yang dipelopori oleh seorang pendeta Terry Jones untuk membakar Al-Qur’an dalam rangka memperingati peristiwa 11 September 2001 (Abadi, 2013).

Ibrahim Kalin, cendekiawan Muslim dari Georgetown University, dalam esainya berjudul *“Islamophobia dan Batas Multikulturalisme,”* mengatakan perdebatan tentang Islam di Eropa merupakan dampak dari kepanikan masyarakat Eropa terhadap isu multikulturalisme. Isu tersebut mengambinghitamkan perkembangan populasi Muslim di Eropa. Berbagai macam bentuk perlawanan dan aksi yang dilakukan oleh para imigran ataupun masyarakat non-eropa terhadap perlakuan diskriminatif tersebut merupakan bentuk dari efek gerakan sosial. Hal tersebut sejalan dengan perpesktif teori Tilly tentang gerakan sosial yakni :

“Social movements as a series of contentious performances, displays and campaigns by which ordinary people make collective claims on others... social movements are a major vehicle for ordinary people’s participation in public politics (Syawaludin, 2014).

Tilly menegaskan bahwa gerakan sosial sebagai “rangkaian interaksi berkelanjutan (sustained series of interactions)” antara otoritas dengan para penantang yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi khusus. Tuntutan-tuntutan yang dimaksud disini ialah perasaan akan perlindungan hukum yang telah jelas dalam lembaga Uni Eropa guna mengawasi serta mendukung perlindungan HAM

Perlindungan hukum terhadap perilaku diskriminasi melalui lembaga yang dibentuk oleh Uni Eropa sendiri yakni European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) yang mendukung dan memberi pengawasan terhadap masalah HAM termasuk diskriminasi dan terkhusus hadirnya Court of Justice of the European Union (CJEU) untuk menegakkan hukum Uni Eropa sehingga pengadilan nasional dari negara-negara anggota memiliki referensi dan dapat menegakkan anti diskriminasi directives yang ada secara ideal. Terakhir, adalah melalui mekanisme peradilan nasional dari masing-masing negara anggota Uni Eropa. Bahwa antara hukum nasional dan hukum Uni Eropa memiliki keterikatan yang erat satu dengan lainnya, maka pengadilan nasional tersebut mendukung penegakan dari anti diskriminasi directives yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (Kusuma, Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, & I Made Budi Arsika, 2013)

Upaya menjawab opini penyesatan Barat terhadap Islam ini, tentunya membutuhkan jawaban yang komprehensif dengan menunjukkan sikap keberagaman Islam yang kaffah dengan menjunjung nilai-nilai ” Salah

satu upaya Barat untuk menjauhkan keberadaan Islam sebagai agama rahmat adalah melalui propaganda media dengan membuat pencitraan negatif tentang Islam dan para pejuangnya, melalui penjulukan-penjulukan terorisme, fundamentalisme yang dipopulerkan media massa” Dalam konteks ini menurutnya, orang-orang yang memiliki persiapan terbatas untuk mengatasi globalisasi. Baik dalam hal pendidikan atau pengalaman, akan memiliki kemungkinan untuk merasa takut dengan perubahan itu dan menjadikan keyakinannya sebagai idiologi sehingga kemudian tidak mempercayai lingkungannya.

Dan kini ada kecenderungan orang mempelajari isi Kitab Suci bukan semata-mata untuk memperkaya spiritual namun untuk melakukan interpretasi bebas dan memformulasikan ideologi demi agenda tertentu. Kondisi yang seperti ini dengan mudah dimanfaatkan oleh negara-negara Barat untuk menyudutkan Islam maupun mendiskreditkan Islam. Apalagi dengan dukungan media yang sangat berkuasa, upaya mengalihkan fungsi Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin menjadi agama kekerasan dengan mudah dipropagandakan Barat.

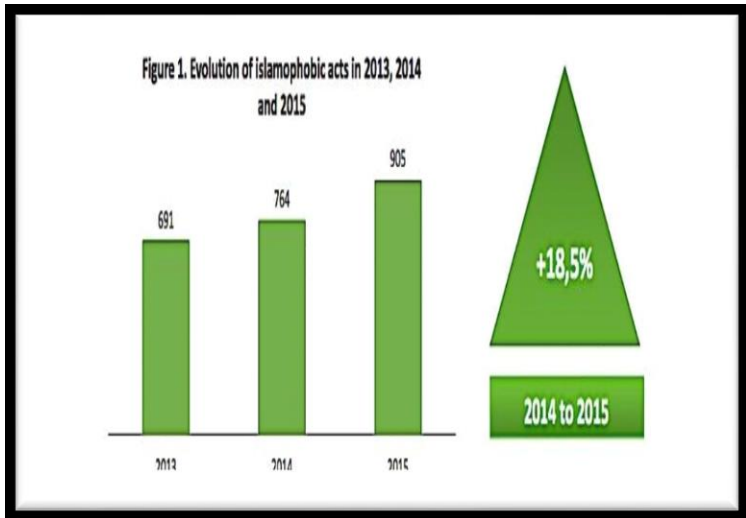
Asep Syamsul M. Romli, S.IP dalam bukunya “*Demonologi Islam, Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*” (Asep Syamsul M. Romli, 2000), menjelaskan, salah satu upaya Barat untuk menjauhkan keberadaan Islam sebagai agama rahmat adalah melalui propaganda media dengan rahmatan lil’alamin. Ketakutan-ketakutan negara-negara Barat terhadap Islam bisa dengan menampilkan ajaran Islam yang cinta akan kebaikan, kedamaian, kerjasama, toleransi dan sebagainya. Hanya saja, sikap-sikap yang demikian, juga membutuhkan dukungan propaganda yang lebih massif melalui berbagai sarana seperti media massa. Selama ini kita akui, bahwa Islam sering menjadi korban dari propaganda media. (Asy’ari, 2011)

Dengan adanya fenomena Islamophobia tersebut telah membuktikan adanya kegagalan proses politik multikulturalisme yang gagal di kawasan Eropa dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran diskriminasi masyarakat Eropa kepada kaum minoritas Muslim di negaranya, seperti yang dikatakan Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron, pada 5 Februari 2011, menyatakan hal yang serupa dengan Kanselir Jerman. Cameron mengatakan negara multikulturalisme telah gagal dan mengimbau pemerintah untuk mewaspadai radikalisme di kalangan pemuda di Eropa. Cameron yang berbicara dalam sebuah konferensi di Munich, Jerman, menyatakan perlu ada sebuah kebijakan aktif yang bisa menyembuhkan hal ini serta mempromosikan nilai-nilai Barat. Ia menghimbau agar Inggris dan Uni Eropa (UE) mewaspadai apa yang sedang terjadi di beberapa wilayah di Eropa saat ini.

Dan dari berbagai pendapat tokoh-tokoh konservatif, pemerintah dan politisi Eropa lainnya menegaskan bahwa kegagalan multikulturalisme adalah juga karena kegagalan kelompok Muslim di Eropa untuk menyesuaikan diri dengan peradaban Eropa yang berbasis pada tradisi Yahudi Kristen atau kebudayaan Eropa dan identitasnya. Persepsi ini kemudian memunculkan sentimen yang berbau rasisme kebudayaan dan agama, yaitu Islamofobia.

Berikut ini beberapa data mengenai tindakan diskriminatif masyarakat Eropa terhadap umat Muslim di Eropa, dimulai dari tingkatan Islamophobia hingga sikap diskriminatif masyarakat Eropa terhadap perempuan Muslim yang tidak sesuai dengan peraturan mengenai kebebasan beragama.

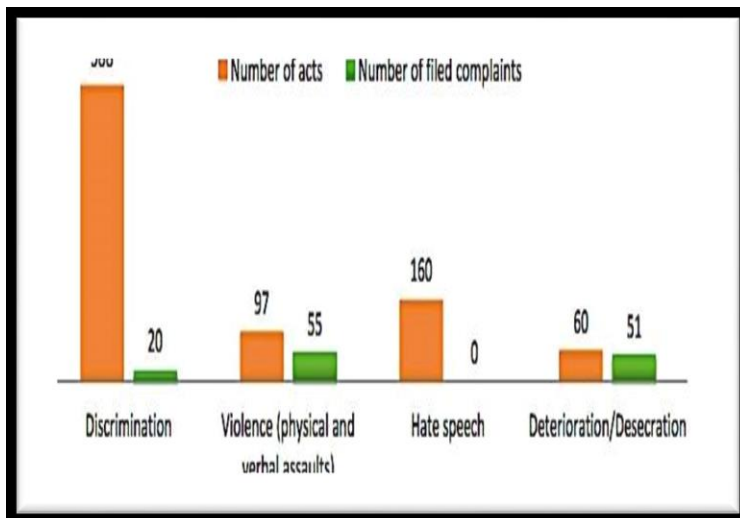
Gambar 4.B.9. Diagram Peningkatan Islamophobia di Perancis 2013-2015



Sumber : Laporan Tahunan CCIF 2015

Pada tahun 2015 merupakan tantangan bagi Multikulturalisme di Perancis. Dalam 10 bulan, Perancis mengalami dua serangan teroris yang menewaskan 146 korban. Kedua tragedi itu dilatarbelakangi oleh islamofobia. Data yang dicatat Collectif Contre L'Islamophobie in France (CCIF), tiga minggu sejak penyerangan Charlie Hebdo bulan Januari, terdapat 120 tindak kriminal berdasarkan islamofobia. Begitu pula tragedi 13 November, peristiwa ini membangkitkan reaksi negatif publik terhadap kaum Muslim di Perancis. Dalam laporan tahunan CCIF seperti yang tertera pada gambar di bawah ini, tindak islamofobia meningkat pesat sebesar 18,5%, dari 764 kasus di tahun 2014 menjadi 905 di tahun 2015. (Ismoyo, 2016)

Gambar 4.B.10. Diagram Tindakan Islamophobia Di Perancis Tahun 2015



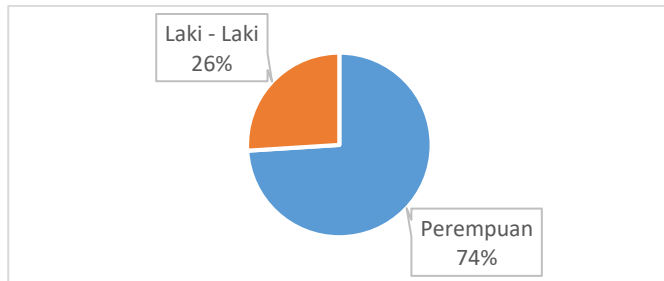
Sumber: Laporan Tahunan CCIF 2015

Fenomena Islamofobia meningkat dalam berbagai jenis tindakan. Dalam gambar 1.2, CIFF melakukan survei dan mendata keluhan yang masuk terkait Islamofobia pada tahun 2014-2015 dan memperlihatkan bahwa tindakan Islamofobia dibagi dalam empat tindakan: diskriminasi, kekerasan (fisik dan verbal), hate speech, dan penodaan terhadap agama. Diskriminasi mencapai 588 kasus, tapi hanya 20 laporan yang masuk ke CCIF. 97 kasus kekerasan (baik fisik maupun verbal) serta 55 laporan yang terdata. Sementara itu, tidak ada laporan dari 160 kasus hate speech yang terjadi. Lalu, terhitung 51 dari 60 kasus penodaan agama yang dilaporkan (CCIF 2015: 18).

CCIF mendata bahwa penyerangan fisik meningkat hingga 150%. Tahun 2014, hanya tercatat 22 laporan dan naik secara signifikan menjadi 55 laporan (naik 2,5%). Kekerasan simbolik naik hingga 140% dibandingkan tahun sebelumnya. Diskriminasi terhadap kaum Muslim mencapai tahap krusial. Kaum Muslim tidak hanya diserang, tapi juga ditargetkan dan ditolak keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari (CCIF 2015: 19). (Ismoyo, 2016)

Diskriminasi lain sebagai akibat dari fenomena Islamophobia di Negara-Negara Eropa juga berdampak kepada perempuan Muslim di Eropa. Adanya kebijakan yang mengharuskan perempuan Muslim tidak menggunakan identitas agamanya seperti Burqa dan Cadar telah memperlihatkan betapa tingginya sikap sentiment anti Muslim saat ini. Eropa yang sangat menjunjung tinggi hak-hak setiap masyarakatnya seakan telah berubah dimana tindakan diskriminatif kepada kelompok minoritas sudah sangat banyak terjadi disebabkan adanya fenomena Islamophobia tersebut.

Gambar 4.B.11. Diagram Diskriminasi Perempuan Muslim Tahun 2015



Sumber: Sumber: Laporan tahunan CCIF 2015

Data tahun 2015 yang diperlihatkan pada gambar 1.4 juga membuktikan bahwa 74% diskriminasi Islamofobia terjadi pada perempuan terutama bagi yang mengenakan penutup kepala. 79% masyarakat Perancis menganggap perempuan berkerudung adalah 'penghalang' bagi 'kehidupan bersama' di Perancis. Ironisnya, penolakan besar-besaran masyarakat Perancis terlihat di ranah publik, 93% responden menyatakan bahwa perempuan berkerudung tidak memiliki tempat di Perancis. Diskriminasi terhadap kaum Muslim terjadi dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan domestik. Stereotip dan prejudice terkait Islam seperti perempuan dengan hijab dan burqa tidak diperbolehkan bekerja. Bahkan pada beberapa kasus yang terjadi hingga tahun 2015, adanya beberapa penyerangan pada perempuan yang menggunakan burqa dan niqab.

Berdasarkan The Polish Institute International Affairs yang mengutip data dari Eurobarometer, adanya tindakan diskriminasi terhadap Islam bertambah parah dari tahun ke tahun. Banyaknya sentimen masyarakat Eropa terhadap umat Muslim semakin memperparah pelanggaran HAM di benua tersebut, hal ini sangat berkaitan juga dengan adanya aktivitas politisasi dari empat partai konservatif Eropa dalam mempolitisasi fenomena Islamophobia tersebut.

Dari data terbaru menyatakan bahwa Perancis (66%) adalah Negara dengan tingkat diskriminasi paling tinggi, kemudian disusul oleh Belgia (60%), Swedia (58%), Denmark (54%), Belanda (51%), dan Inggris (50%). Dibandingkan dengan tahun 2009, terlihat peningkatan signifikan di tahun ini pada Perancis (66%) dan Belgia (60%). Persentase itu naik 30% dibandingkan tahun 2011, dan naik hampir lima kali lipat dibandingkan 1992 (Ismoyo, 2016).